

# 1 PENDAHULUAN

“Kedaulatan pasar bukanlah sekedar pelengkap, tetapi alternatif bagi demokrasi liberal. Bahkan, ia merupakan alternatif terhadap semua bentuk sistem politik, karena ia tidak membutuhkan lagi keputusan-keputusan politik. Pasar telah menjadikan setiap orang atau kelompok kepentingan membuat keputusan-keputusan mereka, secara rasional maupun tidak, atas sejumlah pilihan yang tersedia berdasarkan rujukan-rujukan mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dalam sistem pasar telah menggantikan partisipasi dalam sistem politik. Konsumen kini telah mengambil-alih peran warga-negara”.

(Hobsbawn, 2001)

“Lebih dari yang pernah terjadi sebelumnya, perkembangan partisipasi demokratis di negara-negara Utara maupun Selatan sangat ditentukan oleh tersedianya ruang-gerak yang kian luas untuk tindakan-tindakan otonom oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga oleh proses lokalisasi yang melahirkan bentuk-bentuk perekonomian, teknologi dan ekologi lokal. Ketidakseimbangan kekuasaan tak terduga, yang dilahirkan selama ini oleh globalisasi yang diarahkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, telah menantang kita untuk lebih memahami ranah baru konseptual dan metodologis ini. Saatnya kini untuk memulai prakarsa-prakarsa besar dan luar-biasa untuk menjamin bahwa partisipasi sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak akan terlupakan di abad ini”.

(Pimbert, 2001:84).

Sampai terjadinya krisis perekonomian di Asia yang bermula pada bulan Juli 1997, para pendukung perekonomian global melalui liberalisasi perdagangan biasanya menyebut gagasan mereka sebagai suatu ‘permainan semuanya menang’ (*win-win game*). Teori mereka adalah bahwa perekonomian semua negara yang ikut dalam permainan itu akan bertumbuh sedemikian rupa, karena mereka akan mengeksport apa yang memang mereka kuasai dan mampu sediakan. Lalu, mereka akan mengimpor hanya yang memang tidak mampu mereka adakan sendiri. Inilah yang oleh para pakar ekonomi disebut sebagai ‘keuntungan perbandingan’ (*comparative advantage*).

Meskipun telah terbukti bahwa proses tersebut justru semakin memperlebar jurang pendapatan di banyak negara, teori itu masih tetap yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dalam beberapa hal juga menguntungkan mayoritas rakyat. Semua negara pun didorong untuk meraih keuntungan dengan cara melakukan ekspor termurah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkannya nantinya akan menetes ke lapisan penduduk terbanyak. Tetapi semua teori itu langka terjadi dalam praktiknya. Apa yang terjadi adalah kenyataan --seiring dengan meningkatnya produk nasional kotor (*gross national products* –GNP) dan menjamurnya bursa saham di seluruh dunia hingga kini-- semakin meningkatnya ketidakadilan global, kian merosotnya kehidupan sosial dan keadaan lingkungan hidup, serta hilangnya kedaulatan banyak negara, pemerintahan, dan warga-

negara. Penerima untung terbesar tetaplah perusahaan-perusahaan raksasa lintas-negara (*transnational corporations* –TNC) dan penguasa modal internasional; sementara para pecundang adalah rakyat miskin dan mereka yang kehilangan pekerjaan, atau para penganggur dan pekerja yang dibayar dengan upah rendah yang semakin banyak pula jumlahnya.

Para penganjur teori perdagangan bebas mempermaklumkan bahwa ‘air pasang naik akan mengangkat semua sampan’, menyediakan keuntungan ekonomis menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Namun, kenyataan selama ini jelas-jelas memperlihatkan bahwa yang terangkat ke atas dan melaju hanyalah sekumpulan kecil perahu olahraga atau kapal pesiar mewah (*yachts*).

”...sepanjang dasawarsa 1980an dan 1990an, tekanan-tekanan keras dilancarkan kepada semua negara, terutama oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* –IMF), agar mereka melupakan saja gagasan ke arah kemandirian nasional... dan mengubah rencana untuk lebih mengkhususkan diri memproduksi barang-barang ekspor dalam jumlah yang lebih kecil... Akhirnya, bentuk-bentuk perekonomian dan masyarakat swasembada, perusahaan-perusahaan dan para petani kecil disapu-bersih oleh suatu sistem yang mengirim hasil-hasil pertanian dan barang-barang pabrikaan yang diproduksi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia, tetapi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk pencemaran udara dan lautan, pemborosan energi, dan bahkan penghancuran prasarana umum (yang digantikan dengan jalan-jalan raya, pelabuhan-pelabuhan besar, jaringan pipa-pipa, bendungan-bendungan raksasa, dan bandar-bandar udara baru)”.

(Barker dan Mander, 2000)

Demi mempertahankan ‘keberhasilan’ tersebut, dianjurkanlah sesedikit mungkin hambatan-hambatan perdagangan, sesedikit mungkin kendala bagi kelancaran arus modal, perlunya swastanisasi, deregulasi, tata-cara yang serba pegas, dan pengetatan anggaran belanja pemerintah. Seluruh perekonomian dunia dipacu ke arah penanaman modal ke dalam negeri semaksimal mungkin dan ekspor ke luar negeri semurah mungkin. Terus-menerus didengungkan bahwa semua tindakan tersebut akan benar-benar membawa kemakmuran. Sampai terjadinya krisis perekonomian Asia, semua itu kemudian dirumuskan dalam ukuran-ukuran semakin meningkatnya GNP, nilai bursa saham, dan statistik perdagangan. Para pendukung ‘globalisasi perusahaan’ (*corporate globalisation*) juga memaklumkan bahwa, suatu hari kelak, semua proses tersebut akan menyediakan kelebihan keuntungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, para pengamat mapan pun bersetuju dengan mereka. Tak ada alternatif lain, katanya.

tetapi, demokrasi benar-benar terpuruk oleh semua proses tersebut dan, dalam kenyataannya, mereka telah mempengaruhi semua partai politik seantero dunia. Maka, meskipun para pemilih masih tetap dapat lantang menuntut dan mendesak terjadinya perubahan pemerintahan negara mereka, namun tetap tidak mampu menghasilkan terjadinya perubahan mendasar dalam arah kebijakan pemerintahannya. Di Inggris, pemerintahan Partai Konservatif telah digantikan oleh pemerintahan Partai ‘Buruh Baru’. Walaupun, yang terakhir ini ternyata

sebenarnya pun sudah Thatcherite<sup>1</sup> yang pro perusahaan-perusahaan besar, kebijakan swastanisasi, dan pengetatan anggaran belanja pemerintah, sambil mulai melancarkan apa yang mereka sebut sebagai 'kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta' (*public-private partnerships*) dalam rangka menutup jurang perbedaan keuangan antar keduanya.

Maka, saat ini, para pemain terkuat di luar pemerintah adalah perusahaan-perusahaan swasta raksasa. Mereka menyumbang dana kampanye besar-besaran kepada partai-partai politik di Amerika Serikat, Eropa, dan dimana saja. Agenda perdagangan neoliberal mereka pun menjadi mantra semua partai politik yang terpilih menjadi penguasa pemerintahan. Harga yang harus dibayar oleh semua pemerintahan tersebut adalah menjamin bahwa platform politik dan kampanye mereka memang sejalan dengan agenda perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang menyumbang mereka (Shutt, 2001).

Buku kecil ini ingin menegaskan bahwa dunia kita kini membutuhkan suatu pendekatan baru yang radikal, yakni: 'lokalisasi' (*localisation*) yang sangat potensial untuk secara radikal lebih meningkatkan semua aspek partisipasi demokratis, dan sebagai suatu prasyarat yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan sistem pangan, lingkungan hidup, dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Sebelum mulai menguraikan inti pemikirannya, sangatlah penting untuk memahami dahulu lebih jelas pengertian dasar dari beberapa peristilahan yang digunakan sepanjang buku ini.

## **PENGERTIAN BEBERAPA PERISTILAHAN**

### **Globalisasi perusahaan**

Globalisasi perusahaan (*corporate globalisation*) adalah upaya-upaya yang terus meningkat untuk memadukan perekonomian nasional ke dalam perekonomian global melalui pengaturan-pengaturan penanaman modal, perdagangan, dan swastanisasi, yang didukung oleh kemajuan-kemajuan teknologi mutakhir. Upaya-upaya itu berusaha mengurangi sampai sesedikit mungkin hambatan-hambatan bagi penanaman modal dan perdagangan, tetapi dalam prosesnya ternyata juga mengurangi sampai sesedikit mungkin pengendalian demokratis oleh negara dan rakyatnya atas urusan-urusan perekonomian nasional mereka. Semua proses itu dipacu-laju oleh lobi-lobi politik yang kian menguat dan meluas oleh perusahaan-perusahaan swasta raksasa terhadap semua pemerintahan di semua negara. Mereka menggunakan teori tentang keuntungan perbandingan, persaingan dagang internasional, dan model pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Dan, semua itu terjadi dengan mengorbankan kehidupan sosial, lingkungan hidup, perbaikan taraf hidup kaum buruh, dan semakin meningkatnya ketidakadilan di sebagian besar bagian dunia.

Adalah penting untuk memahami perbedaan yang tegas antara arus global teknologi, gagasan-gagasan, dan informasi, yang selama ini mencoba membangun kembali keberlangsungan hidup masyarakat-masyarakat lokal (inilah yang dikenal

---

<sup>1</sup> Yakni: mengikuti faham dan kebijakan politik mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher (PENTERJEMAH).

sebagai 'internasionalisme' yang bersifat mendukung) dengan proses-proses yang kini dikenal luas dengan istilah 'globalisasi'. Pada hakekatnya, globalisasi adalah suatu upaya sistematis mengurangi semua hambatan perlindungan (*protective barriers*) terhadap arus barang-barang dan modal oleh dan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa menurut aturan-aturan perdagangan internasional. Dan, semua itu telah mengakibatkan suatu negara melawan negara lain, suatu masyarakat berlaga menghadapi masyarakat lain, dan kaum buruh berhadapan-hadapan langsung dengan sesamanya kaum buruh. Itulah intinya, karena struktur dan prosesnya tiada lain adalah melempangkan jalan ke arah pelipatgandaan keuntungan semata. Sementara, internasionalisme lebih merupakan suatu sistem arus gagasan-gagasan, teknologi, informasi, budaya, bahkan juga modal dan barang-barang, sebagai bagian dari upaya melindungi dan membangun kembali perekonomian-perekonomian lokal di seluruh dunia. Penekanannya bukan pada persaingan untuk menyediakan dan memperoleh yang termurah, tetapi lebih pada kerjasama untuk menyediakan dan memperoleh yang terbaik.

Kejelasan peristilahan dan bahasa dalam hal ini sangat menentukan, karena para penganjur dan penikmat keuntungan globalisasi selama ini suka sekali menyalahgunakan pengertian manfaat-manfaat yang tak terbantah dari arus pertukaran internasional tersebut yang, tentu saja, demi membenarkan proses-proses merusak dari globalisasi perusahaan yang mereka anjurkan. Bersamaan dengan semua penyalah-gunaan makna tersebut adalah upaya mereka yang terus-menerus mendendangkan janji-janji bahwa, pada suatu hari kelak, pertumbuhan pesat ekonomi global pada akhirnya juga akan meneteskan berkah bagi lapisan terbesar masyarakat di seluruh dunia.

## **Lokalisasi**

Lokalisasi (*localisation*) adalah suatu proses kebalikan dari arah kecenderungan globalisasi tersebut di atas, yakni yang tegas-tegas bertujuan untuk lebih menguntungkan masyarakat dan perekonomian lokal. Bergantung pada konteksnya, pengertian istilah 'lokal' disini pada umumnya merujuk pada suatu wilayah sebagai bagian dari suatu negara-bangsa, meskipun bisa saja merupakan negara-bangsa itu sendiri, atau bahkan juga suatu pengelompokan beberapa negara-bangsa dalam satu kawasan. Kebijakan dasar yang mengedepankan lokalisasi adalah yang bertujuan meningkatkan kendali perekonomian oleh masyarakat-masyarakat lokal sendiri dan oleh negara-bangsa yang berdaulat penuh. Hasilnya adalah semakin meningkatnya kepejalan dan kerekatan sosial dalam masyarakat lokal tersebut, semakin berkurangnya kemiskinan dan ketidakadilan, serta peningkatan taraf-hidup mereka, terjadinya perbaikan-perbaikan prasarana sosial, semakin terlindunginya lingkungan hidup dan, atas dasar itu, semakin meningkat dan terjaminnya rasa-aman di kalangan mereka.

Lokalisasi sama sekali tidak menghalang-halangi arus informasi, teknologi, perdagangan, penanaman modal, manajemen, dan aturan-aturan hukum yang memang mendukung ke arah lokalisasi dalam pengertian tersebut tadi. Adalah para penganjur baru lokalisasi yang kini kian menekankan pentingnya aturan-aturan perdagangan dan bantuan global. Semua itu memainkan peran menentukan dalam proses berhasilnya peralihan dari globalisasi ke lokalisasi. Dalam makna demikian, maka lokalisasi bukanlah suatu langkah mundur kembali

memperkuat kendali mutlak oleh negara, tetapi lebih menempatkan pemerintah pada peran yang tepat dalam perumusan kerangka kerja dan kebijakan ekonomi yang lebih mengizinkan rakyatnya, kelompok-kelompok masyarakat dan juga pengusaha, untuk menganeka-ragamkan kembali bentuk-bentuk perekonomian mereka sendiri.

### **Demokrasi Partisipatif**

Bagi banyak orang, istilah 'demokrasi' diartikan terbatas hanya sebagai 'demokrasi pemerintahan' (*governmental democracy*). Sebenarnya, pengertian demokrasi yang lebih luas –seperti misalnya yang pernah dirumuskan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance—mengandung makna adanya kesetaraan dan kendali oleh rakyat kebanyakan (*popular control and equality*). Unsur kunci dalam pengertian partisipasi ini adalah bukan semata-mata melalui pemilihan umum saja. Ia juga mengandung suatu sistem yang benar-benar menjamin terwujudnya semua hak sosial dan ekonomi, selain hak-hak sipil dan politik, serta pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya harus ada budaya partisipasi (*a culture of participation*) dimana rakyat membutuhkan sejumlah kemampuan dan sumberdaya untuk berperan (Steele, 2002).

Demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) sudah wujud saat ini di berbagai tempat di dunia. Tetapi, di bawah tekanan kuat globalisasi perusahaan, cenderung menyempit menjadi sekadar tindakan-tindakan pengorganisasian masyarakat dan penentangan terhadap semua kebijakan negara atau pemerintah yang, pada gilirannya, justru akan membawa dampak sebaliknya ke lapisan masyarakat bawah. Banyak dari tindakan-tindakan tersebut yang memang menentang kepentingan-kepentingan khusus kelompok tertentu atau, misalnya, membahayakan pelayanan umum lokal. Mereka mencakup dari organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) sampai ke kelompok-kelompok masyarakat lokal. Tentu saja, ada banyak pula contoh prakarsa-prakarsa baru semacam itu yang justru memperlihatkan kemampuan mempengaruhi dan membalikkan kecenderungan-kecenderungan di tingkat nasional. Di Inggris, misalnya, adalah perkembangan mutakhir yang dramatis dalam perekonomian bahan pangan lokal dimana semakin banyak tersedia mata-rantai langsung antara para petani produsen dengan konsumen mereka, dan semakin meningkatnya kesadaran akan bahan pangan lokal.